

# ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI

## THE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT PREPAREDNESS IN MANAGING PEOPLE WITH DISABILITY TO FACE EARTHQUAKE DISASTER

Riskyana Wulandari<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan  
(riskyana.wulandari@unhan.ac.id)

**Abstrak** - Berdasarkan paradigma bencana sebagai perang, gempa bumi dipandang sebagai musuh yang harus dilawan. Pemerintah adalah unsur utama dalam penanggulangan bencana yang berkewajiban melindungi segenap warga Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Meski demikian, kebijakan dan strategi yang telah disusun cenderung kurang peka terhadap kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Kondisi ini menyebabkan perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi kurang menyertakan kelompok disabilitas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas menghadapi gempa bumi. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Bantul dengan partisipan yang dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan materi audio-visual yang kemudian dianalisis secara tematik menurut Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan bencana Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas adalah dengan mengintegrasikan prioritas dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas ke dalam setiap kegiatan mulai dari asesmen, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem informasi, pangkalan sumber daya, sistem peringatan, pembentukan mekanisme respon, kemudian pendidikan, sosialisasi dan simulasi. Ke depannya, Pemerintah Daerah dapat membangun kesadaran disabilitas pada setiap lapisan masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang positif antar pihak dalam bencana, dan mengkader penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan keberagaman disabilitas.

**Kata Kunci:** Kesiapan Pemerintah Daerah, Penyandang Disabilitas, Pelibatan dalam Penanggulangan Bencana

**Abstract** - Within the paradigm of disaster as a war, earthquake is an enemy that must be countered. Government is the main element in disaster management that has the responsibility to protect its citizen, including people with disability. However, the policies and strategies which are formulated tend to be insensitive toward the special needs of disability and resulted in disaster planning that lacks disability inclusion. This qualitative research aims to analyze the local government preparedness in managing people with disability to face the earthquake disaster. The research is taken place at Bantul Region. The participants are selected through *purposive* and *snowball sampling*. The data collecting techniques are indepth interview, qualitative observation, document

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, dan Magister Sains dalam bidang Pertahanan dari Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

study and audio-visual material which then analyzed thematically according to Cresswell. The results showed that local government disaster preparedness in managing people with disability is by integrating prioritizing and opening participation for people with disability in every starts from assessment, planning, institutional framework, information system, resource base, warning system, response mechanism, education, socialization and simulation. In the future, local government should raise the awareness of disability in every level of community to create positive communication between stakeholders in disasters and empower people with disability as volunteers that able to communicate effectively with the diversity of disability.

**Keywords:** Local Government Preparedness, People with Disability, Involvement in Disaster Management

## Pendahuluan

**D**i dalam sistem pertahanan negara, bencana adalah ancaman nirmiliter yang mengancam keselamatan umum<sup>2</sup>. Hal tersebut sejalan dengan salah satu perspektif menghadapi bencana yaitu bencana sebagai perang<sup>3</sup>. Unsur utama yang bertindak dalam perlawanan menghadapi bencana adalah pemerintahan dengan didukung unsur lainnya. Perlawanan terhadap bencana melalui antisipasi dan pengurangan risiko merupakan perwujudan dari pertahanan negara yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa<sup>4</sup>. Berdasarkan tujuan pertahanan negara tersebut maka keselamatan warga

yang mengalami disabilitas juga termasuk di dalamnya.

Penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia adalah penyandang disabilitas yang berarti setara dengan lebih dari satu miliar orang<sup>5</sup>. Di Indonesia, PUSDATIN Kementerian sosial menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2010 mencapai 11.580.117 penduduk<sup>6</sup>. Kemudian di Kabupaten Bantul, jumlah penduduk penyandang disabilitas mencapai 7.051 jiwa<sup>7</sup>. Salah satu peristiwa yang mendorong angka penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul adalah gempa bumi yang melanda Provinsi D.I.

---

<sup>2</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2014, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Pengarang).

<sup>3</sup> S. Maarif, 2015, disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>4</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *loc.cit.*

---

<sup>5</sup> The World Bank, 2016, "Disaster Overview", dalam <http://www.worldbank.org/en/topic/disability/overview>.

<sup>6</sup> ILO, 2011, *Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia*, dalam [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).

<sup>7</sup> Diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2016.

Yogyakarta pada tahun 2006 dan hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial setempat<sup>8</sup>. Pada peristiwa gempa bumi tahun 2006, permukiman di Kabupaten Bantul cenderung tidak memiliki struktur yang tahan guncangan gempa dan dengan kualitas bahan yang jelek<sup>9</sup>. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berisiko tertimpa runtuh bangunan dan mengalami luka hingga cacat.

Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat hambatan dan kebutuhan yang dialaminya<sup>10</sup>. Ragam kebutuhan penyandang disabilitas diklasifikasikan mulai dari aspek fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik<sup>11</sup>. Beragamnya hambatan yang dialami tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang umumnya tersedia dalam

penanggulangan bencana<sup>12</sup>. Apalagi penyandang disabilitas kurang dilibatkan dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat sehingga program kesiapan bencana yang ada tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka<sup>13</sup>. Upaya jalur dan evakuasi yang tersedia juga sering kali tidak mudah diakses dan kurang memperhatikan cara penyelamatan yang tepat bagi penyandang disabilitas<sup>14,15</sup>. Selain itu, dari sisi pendidikan, terdapat sekolah-sekolah yang belum memiliki materi pengajaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus<sup>16</sup>.

Padahal secara legislasi dan strategi kebijakan isu penyandang disabilitas telah banyak disebutkan sebagai salah satu kelompok rentan yang harus

---

<sup>8</sup> E. Kristanti, 30 Mei 2011, "Duka 100 Penderita Cacat Korban Gempa DIY", dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/223497-duka-100-penderita-cacat-korban-gempa-diy>.

<sup>9</sup> Bappenas, 2006, *Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah*, (Jakarta: Pengarang).

<sup>10</sup> R. Probosiwi, 2013, "Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol.4, No.2, hlm.5-12.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>12</sup> J. Halpern, & M. Tramontin, 2007, *Disaster Mental Health: Theory and Practice*, (USA: Brooks/Cole Cengage Learning).

<sup>13</sup> A. Santoso et al., 2015, "Disabilitas dan Bencana: Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.3, No.12, hlm.2033-2039.

<sup>14</sup> R. Probosiwi, *loc.cit.*

<sup>15</sup> L. Irawan et al., 2014, "Pengelolaan Bencana Erupsi Gunungapi Kelud 2014 Berbasis Masyarakat", dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, *Bunga Rampai Penelitian: Pengelolaan Bencana Pada Kegunungapian Kelud Pada Periode Krisis Erupsi 2014*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

<sup>16</sup> Lissa, 2 Januari 2011, "Seperti Apakah PRB Berbasis Sekolah dan Masyarakat?", *Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat)*, (Kupang: Handicap International Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia).

diprioritaskan dalam bencana. Misalnya dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional<sup>17</sup>; prinsip utama Kerangka Sendai<sup>18</sup>; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 55; Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski demikian, legislasi dan strategi kebijakan ini pada kenyataannya masih belum selaras dengan pelaksanaan yang ada di lapangan sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan di atas.

Kesenjangan antara yang seharusnya dan yang ada seperti dalam uraian di atas menunjukkan bahwa kesiapan bencana perlu memperhitungkan dan melibatkan penyandang disabilitas. Kesiapan bencana (*disaster preparedness*) adalah “pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi profesional dalam tanggap

darurat atau pemulihan, komunitas, dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan pulih dari potensi dampak suatu bahaya”<sup>19</sup>. Kesiapan bencana bersifat luas, pengembangan dan persiapan model evakuasi khusus adalah bentuk kesiapan bencana dalam penanganan penyandang disabilitas<sup>20</sup>. Kesiapan ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya korban bencana dari kelompok penyandang disabilitas sehingga setiap lapisan masyarakat dapat terhindar dari risiko<sup>21</sup>. Dan telah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai unsur utama dalam perlawanan terhadap bencana untuk membangun kesiapan ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan penyandang disabilitas menghadapi bencana gempa bumi. Jenis bencana ini dipilih sebab ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada belum mampu memprediksi secara tepat kapan, dimana dan seberapa besar intensitas gempa bumi yang dapat terjadi sehingga masyarakat harus selalu siap

---

<sup>17</sup> United Nations, 2006, *Convention On The Rights of Persons With Disabilities and Optional Protocol*, (New York: Author).

<sup>18</sup> United Nations, 2015, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)*, (Sendai: Author).

---

<sup>19</sup> UNISDR, 2009, *UNISDR Terminology On Disaster Risk Reduction*, (Geneva: United Nations).

<sup>20</sup> L. Irawan et al., *loc.cit.*

<sup>21</sup> John Twigg, 2015, *Disaster Risk Reduction*, (London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute).

untuk menghadapi bencana ini<sup>22</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus selalu siap terhadap risiko gempa bumi. Selain itu, gempa bumi tahun 2006 disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa yang mendorong jumlah penyandang disabilitas bertambah di Kabupaten Bantul<sup>23</sup>.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan cara pandang induktif yang berfokus pada pemaknaan individual dan untuk menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan<sup>24</sup>. Sudut pandang dunia (*worldview*) yang diterapkan adalah transformatif yang memandang para penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kondisi ini tampak dari jaranganya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan adanya kecenderungan keluarga menutupi keberadaan penyandang disabilitas untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat. Harapan dari penelitian ini adalah agar mampu mengusulkan suatu

agenda perubahan demi memperbaiki kehidupan para penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Partisipan penelitian berjumlah 19 orang yang terdiri atas: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para penyandang disabilitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipilih melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi kualitatif, studi dokumen dan materi audio-visual. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Cresswell<sup>25</sup>.

### Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan pembangunan kesiapan dalam penanganan penyandang disabilitas menghadapi bencana gempa bumi yang sesuai dengan konsep kesiapan bencana oleh Twigg<sup>26</sup>. Twigg merumuskan bahwa terdapat sembilan kegiatan kesiapan bencana yang telah diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah ini. Kesembilan kegiatan ini tidak bersifat kaku, namun dalam pelaksanaannya

---

<sup>22</sup> S. Diposaptono, & Budiman, 2008, *Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami*, (Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer).

<sup>23</sup> E. Kristanti, *op.cit.*

<sup>24</sup> J. Cresswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

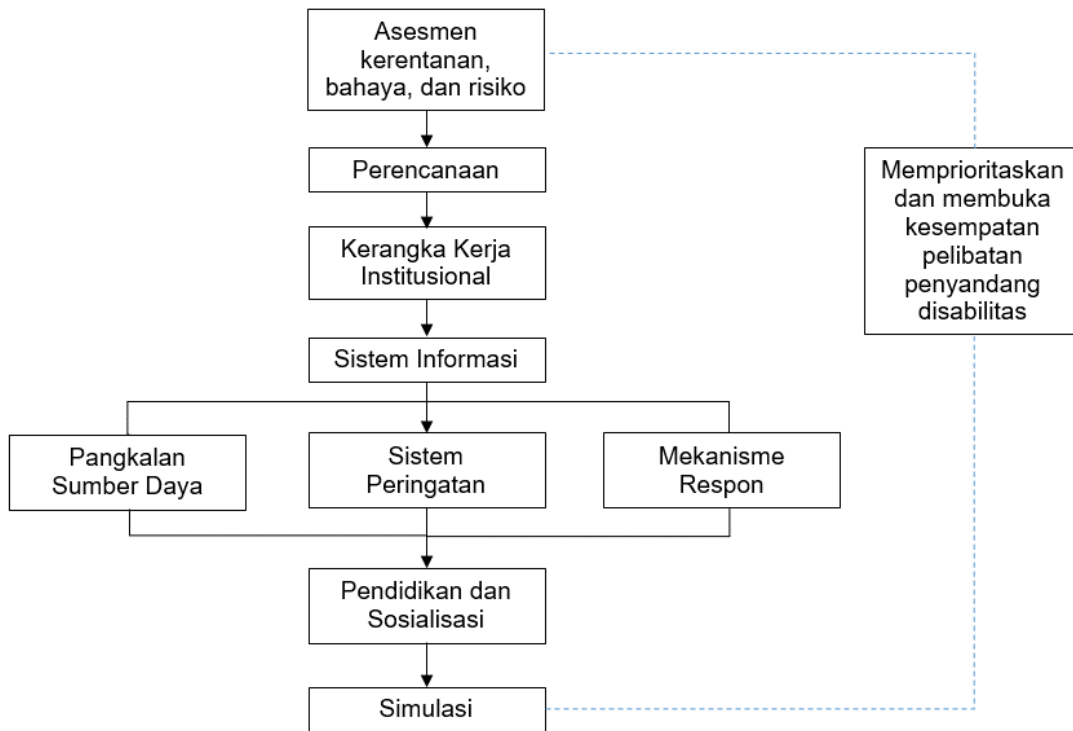
---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> John Twigg, *loc.cit.*

dapat berlangsung secara simultan. Meski demikian, kegiatan asesmen umumnya

selalu menjadi tahapan dasar dalam penentuan tindakan selanjutnya.



**Gambar 1.** Diagram Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas

Sumber: diadaptasi dari Twigg (2015)

### 1. Asesmen Kerentanan

Kabupaten Bantul belum memiliki kajian risiko gempa bumi dan berdasarkan hasil wawancara, asesmen kerentanan terkait penyandang disabilitas yang dilakukan pada Desa Tangguh Bencana (Destana) cenderung masih bersifat umum dan belum merinci hingga jenis kedisabilitasannya. Padahal asesmen kerentanan dapat dikembangkan sebagai langkah awal dalam pengidentifikasian jenis hambatan dan kondisi para penyandang disabilitas. Selain itu, data

yang diperoleh dari hasil asesmen kerentanan dapat digunakan untuk memverifikasi bank data yang dikelola oleh dinas terkait<sup>27</sup>, seperti Dinas Sosial. Kajian risiko bencana memang merupakan proses yang sangat kompleks, meski demikian Pemerintah Daerah dapat memberdayakan para agen bencana yang ada seperti, LSM, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), untuk

<sup>27</sup> *Ibid.*

melakukan peran asesmen kerentanan pada lingkup yang kecil.

Di Desa Kebonagung misalnya, FPRB Desa dan ASB Indonesia mengidentifikasi warga yang mengalami disabilitas dengan menggunakan *Washington Group Question* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sederhana, ringkas, dan mudah digunakan<sup>28</sup>. Melalui penggunaan *Washington Group Question*, masyarakat desa dapat mengidentifikasi dan memahami kapabilitas serta hambatan yang dialami para warga disabilitas yang kemudian dipetakan ke dalam peta evakuasi tingkat pedukuhan. Pada peta evakuasi tersebut terdapat simbol-simbol yang menunjukkan rumah penduduk yang mengalami disabilitas dan jenis hambatannya. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi juga berguna untuk memverifikasi bank data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

## 2. Perencanaan

Perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi yang disusun oleh BPBD Bantul memang tidak ada yang khusus

tentang penanganan penyandang disabilitas, namun dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip inklusif agar tetap menjangkau para penyandang disabilitas setempat. Perencanaan-perencanaan tersebut juga secara tidak langsung memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas sebagaimana Kailes dan Enders<sup>29</sup> mengidentifikasi terdapat lima kebutuhan dasar keberfungsian bagi kelompok *special needs*. Lima kebutuhan ini disebut C-MIST, yaitu: *Communication, Medical, Maintaining Functional Independence, Supervision,* dan *Transportation*. Pelibatan tenaga ahli dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk mengkomunikasikan informasi kepada penyandang disabilitas, rencana penyediaan *buffer stock*, rencana program sosialisasi disabilitas dan gender, adalah bentuk perencanaan yang memenuhi kebutuhan komunikasi dan medis.

Perencanaan yang dilakukan oleh dinas lainnya juga terdapat yang secara tidak langsung mendukung penanganan penyandang disabilitas menghadapi bencana gempa bumi. Misalnya, program

---

<sup>28</sup> Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia, 2015, *Technical Report 2: Capacity Building for Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia*, (Sydney: University of Sydney).

---

<sup>29</sup> J.I. Kailes, & A. Enders, 2007, "Moving Beyond 'Special Needs': A function-Based Framework for Emergency Management and Planning", *Journal of Disability Policy Studies*, Vol.17, No.4, pp.230-237.

Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) dan Pelayanan Terpadu Jamkesus) yang memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan pengadaan alat bantu untuk memenuhi kebutuhan independensi dan medis bagi penyandang disabilitas selama prabencana. Kemudian pengadaan kursi roda dan ambulans mudah akses pada unit-unit puskesmas adalah bentuk sumber daya transportasi yang dapat dimanfaatkan pada situasi bencana gempa bumi. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah perencanaan pembangunan aksesibilitas pada gedung-gedung publik dengan standar desain universal sehingga memudahkan masyarakat dengan berbagai hambatan untuk mengevakuasi diri ketika terjadi gempa bumi<sup>30</sup>.

### 3. Kerangka kerja institusional

Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun oleh BPBD Bantul telah mencakup garis besar pembagian peran dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan penjelasan Coppola<sup>31</sup> bahwa perencanaan mencakup deskripsi

dan ilustrasi yang menggambarkan peran, tanggung jawab, dan koordinasi dari struktur organisasi dalam penanggulangan bencana yang sesungguhnya. Selain telah diuraikan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul, kerangka kerja institusional ini juga didukung dengan adanya regulasi yang menyebutkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan, seperti mandat Permensos Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana; Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan; Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

### 4. Sistem informasi

Sistem informasi gempa bumi dibangun dengan kerjasama antara BPBD Bantul dan BMKG. BMKG secara rutin menyampaikan informasi aktivitas gempa bumi yang terekam kepada BPBD Bantul melalui e-mail. Apabila intensitas yang terekam perlu diwaspadai maka BMKG akan meneruskannya secara langsung

---

<sup>30</sup> Handicap International, 2005, *How to Include Disability Issues in Disaster Management: Following Floods 2004 in Bangladesh*, (Bangladesh: Author).

<sup>31</sup> D. Coppola, 2011, *Introduction to International Disaster Management (2nd Edition)*, USA: Elsevier Inc.



kepada BPBD Bantul yang kemudian didistribusikan melalui saluran media yang ada, seperti *website* dan radio serta ditunjang dengan pelaporan masyarakat setempat. Melalui saluran media berupa *website* dan *radio* maka masyarakat yang mengalami hambatan mendengar atau melihat dapat tetap mengakses informasi bencana gempa bumi<sup>32</sup>.

Pemanfaatan media radio sebagai sarana distribusi informasi bencana menjadi perhatian oleh FPRB Desa Gadingsari. FPRB Desa Gadingsari mengkonfirmasi kejadian-kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat kepada BMKG dan disebarluaskan melalui siaran radio. Upaya ini secara tidak langsung juga mengenalkan BMKG dan BPBD Bantul sebagai sumber resmi informasi bencana kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyerbarluasan informasi dari sumber tidak bertanggung jawab yang justru dapat menimbulkan bahaya dengan mengarahkan masyarakat pada tindakan tidak tepat<sup>33</sup>.

##### 5. Pangkalan Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat empat sumber daya utama dalam penanganan penyandang disabilitas.

---

<sup>32</sup> J.I. Kailes, & A. Enders, *op.cit.*

<sup>33</sup> John Twigg, *loc.cit.*

Sumber daya yang paling utama adalah yang mendukung kemandirian/independensi bagi penyandang disabilitas itu sendiri berupa alat bantu adaptif. Suhartini adalah partisipan penelitian ini yang mengalami hambatan melihat menuturkan bahwa dirinya merasa lebih percaya diri dan yakin melakukan aktivitas dengan menggunakan tuna netra. Menurutnya, hal tersebut juga berlaku pada situasi bencana. Ia memahami bahwa pada situasi seperti di tempat pengungsian, orang-orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga penggunaan tongkat tuna netra akan memudahkan dirinya untuk melakukan kegiatan secara mandiri tanpa harus terus bergantung kepada orang lain.

Sumber daya yang kedua adalah peralatan, perlengkapan dan logistik. BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Bantul telah menganggarkan pengadaan peralatan, perlengkapan dan logistik dalam kegiatan perencanaan yang telah dibahas sebelumnya. Pengadaan tersebut meliputi *buffer stock* obat-obatan, hingga kursi roda dan ambulans pada unit-unit puskesmas. Ketersediaan transportasi ini membantu proses evakuasi korban bencana menjadi lebih efektif agar dapat

mengurangi jumlah korban luka dan meninggal<sup>34</sup>.

Sumberdaya yang ketiga yaitu tempat pengungsian. Kasi Pencegahan dan Mitigasi BPBD Bantul menyatakan bahwa tidak terdapat tempat evakuasi khusus untuk bencana gempa bumi. Hal ini dikarenakan warga umumnya akan mengungsi di sekitar rumah atau tetap menghuni rumahnya yang masih utuh untuk menjaga harta benda. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mempersiapkan gedung-gedung publik mulai dari perkantoran Pemerintah Kabupaten, kantor kecamatan dan desa serta gedung pelayanan publik lainnya agar dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana gempa bumi.

Pembangunan gedung pemerintah harus memperhatikan faktor struktur bangunan tahan gempa dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini telah diatur dalam Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan Pemerintah Kabupaten

Bantul berfokus membangun gedung berstruktur tahan gempa dan menyediakan aksesibilitas pada gedung-gedung baru pasca gempa 2006 dan pada gedung pelayanan publik terdepan seperti puskesmas.

Sumber daya yang keempat adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang diperlukan dalam penanganan penyandang disabilitas adalah staf penanggulangan bencana yang terlatih dan tenaga relawan yang mampu berkomunikasi secara efektif dalam penyebaran peringatan, evakuasi, pelaksanaan tindakan respon, pembuatan asesmen kebutuhan pengelolaan distribusi barang bantuan<sup>35</sup>. Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk SDM tersebut ke dalam Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan bidang masing-masing seperti Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Tim Reaksi Cepat (TRC), *Search And Rescue* (SAR), Pemadam Kebakaran dari BPBD Bantul; Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial Bantul; dan *Bantul Emergency Squad* (BES) dari Dinas Kesehatan Bantul. Akan tetapi, kemampuan Satgas ini masih terbatas untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan para penyandang disabilitas. Oleh

---

<sup>34</sup> D. Coppola, *loc.cit.*

---

<sup>35</sup> John Twigg, *loc.cit.*

karena itu dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi BPBD Bantul tetap bekerjasama dan melibatkan tenaga ahli lainnya seperti LSM (seperti ASB Indonesia), Forum Penyandang Disabilitas (FPDB), dan guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang lebih memahami kebutuhan khusus para penyandang disabilitas.

#### 6. Sistem Peringatan

Alat yang digunakan dalam sistem peringatan gempa bumi umumnya berupa sirine dan kentongan, seperti yang ditemui pada SLB Negeri 1 Bantul serta Desa Gadingsari dan Kebonagung. Sistem peringatan berbasis suara/ alarm (sirine dan kentongan) dapat diakses oleh masyarakat umum yang tidak memiliki hambatan mendengar<sup>36</sup>, akan tetapi sistem peringatan yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak dapat mengakses suara masih sangat terbatas. Di Desa Kebonagung, keterbatasan ini diatasi dengan cara membangun tanggung jawab antar warga untuk meneruskan pesan peringatan gempa bumi kepada warga tuna rungu melalui bahasa isyarat yang dipahami. Di SLB Negeri 1 Bantul, BPBD Bantul dan FPDB memfasilitasi sekolah untuk menentukan

---

<sup>36</sup> Handicap International, *loc.cit.*

bentuk sistem peringatan berupa lampu sirine dan bendera yang dilengkapi di setiap kelas tuna rungu. Jadi saat terjadi gempa bumi, pengajar yang berada di dalam kelas bertugas untuk mengibarkan bendera kepada para siswa tuna rungu sebagai isyarat tanda bahaya.

#### 7. Mekanisme Respon

Gempa bumi memiliki karakter yang dapat muncul secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda sama sekali<sup>37</sup>. Karakteristik ini menyebabkan BPBD Bantul berfokus pada penguatan mekanisme di tingkat masyarakat. Masyarakat adalah yang pertama kali merasakan dampak gempa bumi secara langsung sekaligus dapat berperan sebagai yang pertama bertindak respon di lapangan<sup>38</sup>. Mekanisme respon yang diperkuat pertama adalah tindakan penyelamatan diri pada saat gempa bumi berlangsung berupa 3B (Bersimpuh, Berindung, Bertahan). Tindakan ini disepakati dan disosialisasikan oleh BPBD dan Tagana Bantul kepada masyarakat termasuk para penyandang disabilitas

---

<sup>37</sup> D. Coppola, *loc.cit.*

<sup>38</sup> P. Malakar, 2013, "Making Community Based Disaster Risk Management Disability Inclusive, dalam C. Axelsson, *Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices* (halaman 18-19), (USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific).

disesuaikan dengan derajat kemampuannya. Prinsip tindakan berlindungnya tetap sama hanya saja beberapa gerakan dimodifikasi, misalnya bagi yang menggunakan kursi roda dapat menyeimbangkan kursi rodanya dan menunduk sambil melindungi kepala dengan menggunakan tas dll.

Penentuan respon juga mencakup rute evakuasi dan tempat perlindungan (*shelter*) publik<sup>39</sup>. Pada desa yang telah menerima program Destana seperti Desa Gadingsari dan Kebonagung, respon ini biasanya telah tercantum dalam peta evakuasi tingkat desa bahkan hingga pedukuhan. Penentuan rute evakuasi yang aman perlu melibatkan masyarakat yang berisiko sehingga dapat bertindak secara efektif dan paham kemana harus pergi ketika bencana gempa bumi terjadi. Di Desa Kebonagung, peta evakuasi tidak hanya menggambarkan rute evakuasi dan tempat perlindungan, namun juga menunjukkan para warga yang mengalami hambatan. Adanya informasi dalam bentuk peta evakuasi seperti ini akan memudahkan warga/ tim Penanggulangan Bencana untuk segera memberikan bantuan sebab manula, penyandang disabilitas, ibu hamil atau wanita dengan banyak anak kecil memiliki

---

<sup>39</sup> John Twigg, *loc.cit.*

keterbatasan untuk bergerak secara cepat dan mudah<sup>40</sup>. Tidak memadainya kualitas jalan untuk evakuasi dapat diatasi dengan kerjasama dan kesadaran dari keluarga maupun antar warga. Misalnya, menurut penuturan Sudarmanto, yaitu partisipan penelitian yang mengalami hambatan gerak, keluarga/ warga dapat menggunakan gerobak untuk mengevakuasi penyandang disabilitas fisik.

Mekanisme respon ini juga mencakup langkah-langkah pelaporan dari tim Penanggulangan Bencana Desa kepada Pemerintah Desa dan dinas terkait, seperti BPBD, Tagana, dan Dinas Kesehatan Bantul. Pendataan dalam kaji cepat yang optimal sebaiknya mencakup kondisi para penyandang disabilitas baik dari jenis hambatan yang dialami hingga kebutuhannya sehingga dinas pemerintah dapat berkoordinasi untuk memenuhinya<sup>41</sup>. Pengelolaan mobilisasi sumber daya transportasi juga penting pada tahapan ini agar evakuasi korban bencana gempa bumi dapat berjalan secara efektif<sup>42</sup>.

## 8. Pendidikan dan Sosialisasi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> J.I. Kailles, & A. Enders, *loc.cit.*

Kesiapsiagaan untuk merespon bencana secara efektif harus diperkuat pada setiap tingkatan, baik dari staf atau tenaga relawan penanggulangan bencana hingga masyarakat<sup>43</sup>. BPBD, Tagana, dan Dinas Kesehatan Bantul secara rutin memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf dan tenaga lapangannya sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing, termasuk tentang penanganan kelompok risiko tinggi seperti penyandang disabilitas. Meski demikian, pendidikan dan sosialisasi ini sifatnya memang umum, artinya Satgas yang ada belum dibekali dengan kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan keragaman disabilitas. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas pada tenaga relawan lainnya seperti FPDB sangat dibutuhkan.

Pendidikan dan sosialisasi juga dilaksanakan pada tingkat sekolah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Bantul serta partisipan Sandi (tuna daksa) dan Suhartini (tuna netra), pendidikan dan sosialisasi yang diberikan dari instansi/dinas Pemerintah Daerah cenderung bertempat di balai desa, sekolahan, atau tempat pertemuan. Padahal penyandang disabilitas umumnya mengalami kesulitan

---

<sup>43</sup> D. Coppola, *loc.cit.*

untuk mengakses tempat publik karena keterbatasan mobilitas atau komunikasi<sup>44</sup>. Country Director ASB Indonesia turut mengutarakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan adalah tempat sosialisasi yang jauh untuk diakses. Oleh karena itu pendidikan dan sosialisasi diharapkan dapat lebih didekatkan kepada para penyandang disabilitas, misalnya dilakukan secara bertingkat dari rumah tangga, pedukuhan, hingga desa.

#### 9. Simulasi

Semua tahapan kesiapan bencana kemudian dilatihkan dalam simulasi bencana gempa bumi. Simulasi berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku yang terlibat dalam respon untuk mempraktekkan peran dan tanggung jawabnya sebelum kejadian sesungguhnya terjadi. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan masyarakat dengan para agen dalam penanggulangan bencana sehingga terbangun komunikasi yang positif<sup>45</sup>. BPBD Bantul telah menyadari hal ini, oleh sebab itu mereka berusaha agar para penyandang disabilitas yang ada di tempat dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan simulasi.

---

<sup>44</sup> Handicap International, *loc.cit.*

<sup>45</sup> D. Coppola, *loc.cit.*

Tujuannya adalah agar antar warga, tenaga relawan, dan pihak berwenang lainnya mengetahui bahwa terdapat warga setempat yang mengalami disabilitas sehingga diperhitungkan dalam tindakan respon yang dilatihkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara partisipasi penyandang disabilitas pada simulasi bencana gempa bumi lingkup desa dan sekolah. Di SLB Negeri 1 Bantul, simulasi yang dilakukan fokus terhadap penanganan penyandang disabilitas sebab para siswa terdiri atas beragam jenis disabilitas. Simulasi yang dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari per jurusan hingga akhirnya simulasi besar tingkat sekolah. Di setting pedesaan, simulasi bencana gempa bumi biasanya dilaksanakan pada tingkat desa yang bertempat di Kantor Kelurahan/Desa atau titik kumpul akhir desa. Tempat simulasi bencana gempa bumi seperti ini dapat kembali menimbulkan kendala akses dan mobilitas para penyandang disabilitas<sup>46</sup>. Selain itu, menurut keterangan staf TRC BPBD Bantul, kadang terdapat kasus dimana penyandang disabilitas itu sendiri tidak mau terlibat dalam simulasi entah karena merasa malu atau lainnya. Situasi

---

<sup>46</sup> Handicap International, *op.cit.*

seperti ini menyebabkan harus ada yang bermain peran sebagai penyandang disabilitas agar informasi tentang penanganan penyandang disabilitas tetap tersampaikan kepada warga lainnya.

Desa Gadingsari dan Kebonagung termasuk yang telah melibatkan penyandang disabilitas beserta keluarga/pendamping dalam simulasi bencana gempa bumi. Desa Kebonagung bahkan melaksanakan simulasi secara berjenjang, yaitu pada setiap rumah warga yang mengalami disabilitas, tingkat pedukuhan, kemudian tingkat desa/ gladi. Keluarga/pendamping memiliki peran besar untuk menginformasikan dan membantu anggotanya yang mengalami disabilitas, oleh sebab itu mereka didorong untuk juga berpartisipasi dalam simulasi tingkat dukuh atau desa. Selain itu, penyandang disabilitas tersebut juga diberi kesempatan berpartisipasi dalam simulasi bencana gempa bumi tingkat dukuh/ desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan aksesnya.

Pembahasan-pembahasan di atas menunjukkan bahwa poin “memprioritaskan dan membuka kesempatan pelibatan penyandang disabilitas” (lihat Gambar 1) harus terintegrasi ke dalam setiap kegiatan kesiapan bencana gempa bumi. Inilah

temuan dalam penelitian yang diharapkan dapat menjadi agenda perubahan bagi para penyandang disabilitas dalam konteks bencana. Pengarusutamaan inklusi penyandang disabilitas tidak hanya akan berdampak pada optimalnya kesiapan bencana Pemerintah Daerah, tapi juga dapat berdampak pada kesiapan bencana di lingkup lebih kecil seperti pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Bantul mulai memperhatikan dan mengikutsertakan para penyandang disabilitas dalam kegiatan kesiapan bencana gempa bumi. Hal ini tampak dari partisipasi FPDB dalam penyusunan RPB, renkon maupun keanggotaan FPRB Kabupaten serta sosialisasi dan simulasi bencana yang dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul dan masyarakat. Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas diikutsertakan dan diberdayakan dalam kegiatan-kegiatan Pemkab sebab yang paling mengerti dan ahli tentang kebutuhan para penyandang disabilitas adalah yang mengalaminya sendiri.

Pengarusutamaan inklusi penyandang disabilitas belum dapat mendetail pada lingkup pedesaan yang bisa dipelajari dari pengalaman Desa

Gadingsari. Desa Gadingsari telah melaksanakan program Destana yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada tahun 2012-2013, namun pendataan warga disabilitas belum mendetail hingga jenis hambatan dan pemetaannya. Aksesibilitas di gedung kantor kelurahan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan Destana juga belum tampak. FPRB Desa Gadingsari baru memahami bahwa warga disabilitas harus diperhatikan dan diikutsertakan dalam konteks bencana setelah mendapatkan program PRB Inklusif dari FPDB pada tahun 2015-2016. Berkat program dari FPDB tersebut, Desa Gadingsari telah memiliki data lengkap warga yang menyandang disabilitas dengan jenis hambatannya dan terpetakan dalam peta evakuasi desa.

Pengalaman pengarusutamaan inklusi penyandang disabilitas juga tampak dari Desa Kebonagung yang melaksanakan Destana Inklusif dengan difasilitasi oleh ASB Indonesia pada tahun 2014-2015. RPB Desa Kebonagung telah melibatkan dan memasukkan isu penyandang disabilitas mulai dari kebijakan, strategi dan bentuk kegiatan serta dalam keanggotaan FPRB Desa. Salah satu bentuk kegiatannya adalah “menciptakan aksesibilitas fasilitas umum dan rumah untuk mendukung

peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dan lansia”<sup>47</sup>. Kegiatan ini turut mendorong diadakannya pembangunan ram di puskesmas dan kantor kelurahan serta pembangunan toilet penyandang disabilitas di kantor kelurahan sehingga tidak hanya mendukung kesiapan bencana desa tapi juga mendukung pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pengalaman-pengalaman yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kesiapan bencana dalam penanganan penyandang disabilitas didukung oleh kesadaran pada setiap lapisan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Peristiwa gempa bumi tahun 2006 menjadi pembelajaran besar bagi Pemkab Bantul untuk memperbaiki kesiapan bencana yang dibangun. Pemkab Bantul tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian pelayanan namun juga pemberdayaan para penyandang disabilitas agar dapat mengurangi risiko bencana gempa bumi. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Twigg<sup>48</sup> bahwa Pemerintah Daerah harus memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterampilan, pengalaman

dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana jika diberikan sumber daya dan kesempatan yang tepat.

## **Kesimpulan**

Pengarusutamaan inklusi penyandang disabilitas dalam kesiapan bencana gempa bumi dilakukan melalui prioritas dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas. Inilah yang dapat menjadi agenda perubahan demi pengharapan hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam konteks bencana. Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan prioritas dan pembukaan kesempatan partisipasi pada setiap tahapan kesiapan bencana, dimulai dari asesmen, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem informasi, pangkalan sumber daya, sistem peringatan, pembentukan mekanisme respon, kemudian pendidikan, sosialisasi dan simulasi. Kesiapan bencana juga sebaiknya didekatkan kepada penyandang disabilitas melalui kegiatan yang berjenjang sebab penyandang disabilitas umumnya mengalami hambatan mobilitas dan aksesibilitas yang mengakibatkan mereka kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Misalnya, sosialisasi dari rumah ke rumah

---

<sup>47</sup> Pemerintah Desa Kebonagung, 2015, *Rencana Penanggulangan Bencana*, (Desa Kebonagung: Pengarang).

<sup>48</sup> John Twigg, *loc.cit.*



warga yang mengalami disabilitas, tingkat pedukuhan hingga desa.

Ke depannya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat 1) membangun kesadaran terhadap penyandang disabilitas pada setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang positif antara penyandang disabilitas dengan agen penanggulangan bencana dan warga sekitar; dan 2) mengkader para penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan sehingga BPBD memiliki tenaga ahli yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan keanekaragaman disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2014). *IRBI: Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2013*. Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputy Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Bappenas. (2006). *Buku utama rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Pengarang.
- Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia, (2015). *Technical report 2: Capacity building for disability inclusive disaster risk reduction in Indonesia*. University of Sydney, NSW 2006. University of Sydney.
- Coppola, D. (2011). *Introduction to international disaster management (2nd edition)*. USA: Elsevier Inc.
- Cresswell, J. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Dinas Sosial Kabupaten Bantul. (2016). *Data penyandang disabilitas Kabupaten Bantul*. Kabupaten Bantul: Pengarang.
- Diposaptono, S., & Budiman. (2008). *Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami*. Bogo: Penerbit Buku Ilmiah Populer.
- Halpern, J., & Tramontin, M. (2007). *Disaster mental health: Theory and practice*. USA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Handicap International. (2005). *How to include disability issues in disaster management: Following floods 2004 in Bangladesh*. Bangladesh: Author.
- ILO. (2011). *Inklusi penyandang disabilitas Indonesia*. Diambil dari [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).
- Irawan, L., Wardhani, P., & Sartohadi, J. (2014). *Pengelolaan bencana erupsi Gunungapi Kelud 2014 berbasis masyarakat*. Dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, *Bunga rampai penelitian: Pengelolaan bencana pada Kegunungapian Kelud pada periode krisis erupsi 2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kailes, J.I., & Enders, A. (2007). *Moving beyond "special needs": A function-*

- based framework for emergency management and planning. *Journal of Disability Policy Studies*, Vol.17, No.4, pp.230-237.
- Kani, S. (2013). Inclusive early-warning systems and priority evacuation assistance. Di dalam C. Axelsson, *Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices* (halaman 18-19). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific.
- Kristanti, E. (30 Mei 2011). *Duka 100 penderita cacat korban gempa DIY*. Diambil kembali dari Nasional Viva: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/223497-duka-100-penderita-cacat-korban-gempa-diy>.
- Lissa. (2 Januari 2011). Seperti apakah PRB berbasis sekolah dan masyarakat? *Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat)*. Kupang, Nusa Tenggara Timur: Handicap International Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia.
- Maarif, S. (2015). Paradigma bencana. Disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Malakar, P. (2013). Making community based disaster risk management disability inclusive. Di dalam C. Axelsson, *Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices* (halaman 18-19). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific.
- Mujiyono, Y. (27 November 2015). *Puluhan penyandang disabilitas di Klaten ikuti pelatihan pengurangan risiko bencana*. Diambil kembali dari RRI Online: [http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/18359/bencana\\_alam/puluhan\\_penyandang\\_disabilitas\\_di\\_klaten\\_ikuti\\_pelatihan\\_pengurangan\\_risiko\\_bencana.html](http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/18359/bencana_alam/puluhan_penyandang_disabilitas_di_klaten_ikuti_pelatihan_pengurangan_risiko_bencana.html).
- Pemerintah Desa Kebonagung. (2015). Rencana Penanggulangan Bencana. Desa Kebonagung: Pengarang.
- Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
- Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol.4, No.2, hlm.5-12.
- Santoso, A., Noor, I., & Ulum, M. (2015). Disabilitas dan bencana: Studi tentang agenda setting kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.3, No.12, hlm.2033-2039.
- The World Bank. (2016). Disability overview. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/topic/disability/overview>.
- Twigg, J. (2015). *Disaster risk reduction*. London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2016 tentang  
Penyandang Disabilitas.

UNISDR. (2009). *UNISDR terminology on  
disaster risk reduction*. Geneva:  
United Nations.

United Nations. (2006). *Convention on the  
rights of persons with disabilities  
and optional protocol*. New York:  
Author.

\_\_\_\_\_. (2015). *Sendai framework  
for disaster risk reduction (2015-  
2030)*. Sendai: Author.